



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan
issn 2354-6174 eissn 2476-9649
Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah
Volume 9 Nomor 2 2021, (215-140)
DOI: 10.21043/fikrah.v8i1.9287

Perilaku Radikalisasi Beragama masa Pandemi COVID 19 di Provinsi Jambi

Fridiyanto

Dosen UIN STS Jambi

fridiyanto@uinjambi.ac.id

M. Kholis Amrullah

Dosen UIN Antasari Banjarmasin

kholisamrullah90@gmail.com

Muhammad Rafi'i

Dosen STAI Ahsanta

arrafi1995@gmail.com

Muhammad Sobri

Dosen Universitas Negeri Jambi

muhammadsobri@unja.ac.id

Abstract

This article examines how COVID-19 Pandemic to be a moment for Islamist group in radicalizing the communities. In many studies have explained that Islam Defend Movement 212 as the biggest moment for Islamism arising. Post 212 movement there was no significance issue to trigger the society. Therefore COVID 19 Pandemic to be islamism consolidation that actually has been fragmented. This reserach used netnography method where the researcher make digital world to be a field of research. Data was collected by observing communities in Facebook groups managed and commented on by the Jambi community. Data was also obtained by collecting online news in Jambi Province. In addition, to add data, the researcher conducted in-depth interviews with 10 informants. Then the reseracher interpreted the symbols, images, and communication patterns that took place in the Facebook group and online

media. Furthermore, the data is displayed, analyzed and concluded with the stages carried out in netnographic research. Research findings that COVID 19 Pandemic was capitalised for "anti China" issues and to be a tool to criticise Joko Widodo government because his policy about social distancing has been limited Muslim rituals out of home. The research analysis that COVID 19 Pandemic has been a significance momentum to nurture and to consolidate Islamist group who have experienced at least the issues and the stage for taking action and preserving the views of Islamism. This article discusses that the COVID-19 Pandemic as a curriculum for internalizing Islamism will become a social capital to realize the ideological agendas of radical groups.

Key words: COVID 19 pandemi, islamist group, radicalisation in religion

Abstrak

Artikel ini menguji bagaimana Pandemi COVID-19 menjadi momen bagi kelompok Islamis dalam meradikalisasi masyarakat Muslim. Dalam banyak penelitian telah dijelaskan bahwa Aksi Bela Islam merupakan sebuah peristiwa atas kebangkitan konservatisme. Setelah rentetan Aksi Bela Islam tidak terdapat lagi isu penting untuk menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu Pandemi COVID-19 menjadi media konsolidasi Islamisme yang sebenarnya telah terfragmentasi. Penelitian ini menggunakan metode netnografi dimana peneliti menjadikan media sosial menjadi lapangan penelitian. Data dikumpulkan dengan mengamati grup Facebook yang dikelola dan dikomentari oleh masyarakat Jambi. Sebagai data tambahan, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 10 informan. Kemudian peneliti melakukan interpretasi simbol, gambar, dan pola komunikasi yang berlangsung di grup Facebook dan media *online*. Selanjutnya, data disajikan, dianalisa, dan disimpulkan dengan tahap-tahap penelitian netnografi. Temuan penelitian bahwa Pandemi COVID-19 telah dikapitalisir menjadi isu anti Cina dan menjadi sebuah alat kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo karena kebijakan terkait pelarangan kegiatan ibadah di luar rumah. Hasil analisis bahwa Pandemi COVID-19 telah menjadi momentum untuk memelihara dan sebagai sarana konsolidasi dan menjaga semangat kelompok Islamis. Diskusi artikel ini bahwa Pandemi COVID-19 merupakan sebuah kurikulum untuk internalisasi Islamisme dan menjadi modal sosial untuk menjalankan agenda kelompok radikal.

Kata Kunci: Islamis group, radikalisasi beragama, pandemi COVID-19,

Pendahuluan

Saat ini konservatisme Islam di Indonesia sedang menguat kembali. Terdapat kecenderungan kebangkitan kelompok konservatif yang tidak hanya karena muncul gerakan Islam kontemporer pasca reformasi. Namun juga disebabkan konservatisme telah masuk ke organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah (Bruinessen, 2013). Dari dua organisasi ini, Nahdlatul Ulama tidak masuk dalam kategori telah terpapar radikalisme, karena kalangan *nahdliyin* sangat sulit untuk disusupi kaum radikal. Aksi-aksi kelompok Islam radikal pada tingkat ekstrem yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Negara Islam (Endi Aulia Garadian, 2019). Secara jelas dan

terbuka kelompok Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ingin mengganti sistem pemerintahan dengan kekhilafahan. Sedangkan kelompok Front Pembela Islam (FPI) berjuang ingin mendirikan NKRI bersyariah. Dua kelompok Islam radikal ini merupakan operator penyelenggaraan aksi-aksi besar kelompok Islamis. Di era digital kelompok-kelompok Islamis sangat mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia.

Proses radikalisasi dan penguatan kelompok Islamis di masa Pandemi COVID-19 tidak terlepas dari pengaruh dunia digital. Dari 272,1 juta penduduk Indonesia, 175, 4 juta pengguna 160 juta penduduk merupakan pengguna aktif media sosial, Indonesia masuk dalam peringkat keempat. 10 media yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu: *Youtube*, 140, 8 juta (88%); *Whatsapp*, 134, 4 juta (84%); *Facebook*, 131, 2 juta (82%); *Instagram*, 126, 4 juta (79%); *Twiter*, 89, 6 juta (56%); *Line*, 80 juta (50%); *FB Messenger*, 80 juta (50%); *Linkedin*, 56 juta (35%); *Pinterest*, 54, 4 juta (34%); *Wechat*, 46, 4 juta (29%). Dari media sosial tersebut proses radikalisasi di era Pandemi COVID-19 semakin gampang dilakukan (Kompas, 2020). Ceramah-ceramah yang berpaham radikal semakin marak ketika momentum pemilihan umum presiden di tahun 2019. Ceramah agama yang beredar di media digital, lebih tepat disebut sebagai ujaran kebencian dan ironisnya masyarakat menyepakati konten ujaran kebencian tersebut (Rapik, Permatasari, & Anisya, 2020).

Perilaku radikalisasi beragama sangat nampak ketika terdapat momentum politik elektoral. Jauh sebelum pemilihan kepala daerah Jakarta 2017, penguatan politik identitas sudah lama terjadi di tingkat lokal. Agama dan etnis menjadi bahan bakar dalam momentum politik (Muhtadi, 2018). Bentuk konservatisme juga muncul dalam budaya pop yang digunakan untuk propaganda Islamisme (Akmaliah, 2020). Di Indonesia saat ini kelompok radikal telah berhasil merebut simpati dengan cara populer, misalnya melalui media sosial seperti *Youtube* yang dikuasai oleh kelompok Islam konservatif yang banyak menjangkau masyarakat luas.

Penguatan radikalisme juga terjadi di lembaga pendidikan. Bahkan penanaman dan penyebaran radikalisme sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga. Upaya pencegahan radikalisme memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat (Convey, 2020). Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat persemaian perdamaian, justru guru agama berkontribusi meradikalisasi murid (Maulana, 2017). Gagasan radikal disusupi

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk momen Pandemi COVID-19.

Radikalisasi beragama nampak dalam kasus Pandemi COVID-19, di lembaga pendidikan banyak diajarkan untuk tidak takut terhadap virus COVID-19. Allah cukup menjadi pelindung, karena virus Corona adalah tentara Allah untuk menghancurkan China yang telah zalim terhadap minoritas Uighur, demikian disampaikan dalam banyak lembaga yang menyelenggarakan ceramah dari ustadz yang berpaham konservatif. Kelompok konservatif menjadikan agama sebagai alat melindungi diri dari COVID-19 dengan mengabaikan sains (Maliki, 2020).

Momen Pandemi COVID-19 kemudian berdampak pada semakin intens radikalisasi masyarakat Islam. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan manusia, tetapi sudah mengubah secara revolusioner setiap aspek kehidupan manusia di dunia. Berbagai negara melakukan banyak strategi untuk mencegah penyebaran COVID-19, di antara yang dilakukan adalah *lockdown*, di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Dalam upaya menyukseskan strategi *social distancing* dan PSBB salah satu strategi yang digunakan pemerintah adalah dengan optimalisasi peran otoritas keagamaan, misalnya meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa, dan juga keterlibatan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.

Namun demikian, pelibatan otoritas keagamaan tersebut tidak berjalan sukses, banyak masyarakat tidak mematuhi misalnya fatwa MUI, dan himbauan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. MUI telah mengeluarkan fatwa untuk tidak menjalankan shalat berjamaah di tengah wabah, pada faktanya, masyarakat tidak banyak mengikuti fatwa, atau himbauan MUI, dan ormas Islam. Masyarakat masih tetap menjalankan shalat Jumat, shalat berjamaah, shalat sunat tarawih, dan shalat Iedul Fitri di musholla dan masjid.

Provinsi Jambi dikenal sebagai daerah yang cukup kondusif. Tetapi berdasarkan penelitian, Jambi sangat berpotensi terhadap aktivitas radikal dan teror. Beberapa kawasan hutan Jambi dinilai oleh kelompok teror merupakan tempat ideal untuk kamp pelatihan (Rapik et al., 2020). Bentuk nyata gerakan radikal di Jambi dilihat pada tanggal 7 Juni 2018, di Kabupaten

Bungo Tim Densus 88 menangkap dua orang anggota *Jamaah Ansharut Daulah* yang telah melakukan banyak aksi teror seperti di Surabaya dan Riau (Rapik et al., 2020). Momen Pandemi COVID-19 pola-pola ekstrem dalam beragama mulai muncul. Ekspresi keagamaan dalam menyikapi pandemi COVID-19 dapat diamati di media sosial terutama *platform Facebook* dan *media online*. Dalam grup-grup *Facebook* masyarakat Jambi, terdapat proses radikalisasi beragama dengan mengaitkan COVID-19 dengan paham keagamaan, politik, pemerintahan Joko Widodo, Cina yang menindas Islam, sikap tauhid yang mengabaikan sains dan teknologi.

Di Jambi Forum Koordinasi Pencegahan Teroris mengalami kendala dalam program deradikalisasi, karena masih teridentifikasi kuatnya Islamisme di kalangan masyarakat Jambi. Terdapat kecenderungan terhadap paham kekerasan agama yang cenderung meningkat (Rapik et al., 2020). Namun masyarakat Jambi dinilai masih moderat dalam menghadapi COVID-19. Dari sebuah hasil survei yang dilakukan di Jambi ditampilkan persentase sebagai berikut: 1) COVID-19 merupakan ujian dari Allah SWT (85%); 2) tawakal menghadapi COVID-19 (96%); 3) mematuhi instruksi Pemerintah, Fatwa ulama dan protokol kesehatan (94%); 4) shalat Idul Fitri di masjid (50%); 5) menilai himbauan MUI untuk shalat dirumah sebagai hal berlebihan (64%); 6) COVID-19 semakin mendekatkan diri kepada Allah (95%); 7) mengikuti protokol di masa *new normal* (91%); 8) shalat Jum'at di rumah (59%); 9) shalat tarawih di rumah (79%) (Ramli dkk, 2020). Faktanya, data survei ini memiliki ketimpangan jika dilihat dalam *platform* media sosial seperti *Facebook* dan pemberitaan di *media online*. Masyarakat Jambi masih menampilkan ekspresi dan berperilaku radikal dalam menyikapi pandemi COVID-19.

Terorisme berawal dari radikalisme (Rapik et al., 2020). Oleh karena itu sangat penting untuk secara mendalam mempelajari bagaimana proses radikalisasi beragama dilakukan. Tidak banyak penelitian dengan pendekatan netnografi yang mempelajari bagaimana masyarakat di sebuah wilayah mengekspresikan pandangan keagamaan dalam menyikapi Pandemi COVID-19. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah teori dari hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai bagaimana kelompok radikal Islam menjadikan Pandemi COVID-19 sebagai sebuah momentum, propaganda serta sebagai internalisasi pandangan radikalisme ke masyarakat awam yang tidak berafiliasi ke organisasi Islam ekstrem seperti Front Pembela Islam, dan HTI. Artikel berdasarkan penelitian dengan metode netnografi ini menjelaskan

bagaimana konservatisme Islam yang sebenarnya telah menguat semakin mendapatkan momentum di masa Pandemi COVID-19 untuk meradikalisasi pandangan beragama dan penguatan aksi kelompok Islamis. Serta bagaimana terjadi proses internalisasi pandangan radikalisme ke masyarakat awam yang sebelumnya tidak berpandangan sebagaimana Islam konservatif. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Pandemi COVID-19 menjadi sebuah kurikulum dan media internalisasi serta perilaku radikalisme dalam beragama. Bagi kelompok Islamis, ideologisasi sangat penting sebagai modal sosial untuk memelihara semangat konservatisme, yang bisa digunakan untuk agenda Islamisme.

Kajian Teori

Radikalisasi Beragama Masa Pandemi COVID-19

Radikal sebagai kata sifat berarti secara mencolok menyerukan atau meninggalkan cara biasa untuk kemudian mengikuti paham serta cara revolusioner dan ekstrem guna perubahan menyeluruh yang berdampak luas dan panjang. Sedangkan radikalisme adalah sebuah keyakinan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan secara revolusioner (Azra, 2020). Radikalisme beragama dapat dipahami sebagai pandangan kolot, dan tekstual serta menjadikan kekerasan dan pemaksaan kehendak terhadap orang yang berbeda dari kelompoknya yang sudah merasa paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis (Hafid, 2020). Pandangan radikal tidak terlepas dari konservatisme dalam beragama.

Konservatisme Islam merupakan tantangan bagi keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler yang berimplikasi bagi sosial, budaya, dan politik (Sebastian, Hasyim, & Arifianto, 2020). Diskursus Islam Indonesia secara sederhana dapat diklasifikasi dalam beberapa istilah seperti: Islam Moderat, Islam liberal - progresif dan Islam Radikal - fundamentalis (Boy, 2017). Penyebutan konservatif, radikal, dan fundamental sering diartikan sama. Namun jika dilihat bahwa radikalisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Mudah menyesatkan orang lain dan merasa paling benar; Mengabaikan ajaran Islam yang *washatiyyah*; Berlebihan dalam beragama dan mengabaikan cara *bi al-hikmah*; Keras dalam komunikasi dakwah (Hafid, 2020). Masa Pandemi COVID-19, berlebihan dalam beragama muncul dari kalangan Muslim, seperti shalat tarawih yang sunnah tetap dilakukan, padahal menjaga keselamatan dan nyawa lebih utama. Radikalisasi di

Indonesia disebabkan tiga faktor, yaitu: perkembangan di tingkat global, penyebaran paham wahabi, dan kemiskinan (Asrori, 2017).

Fenomena radikalisasi beragama disebabkan lemahnya pendidikan kewargaan (Abdullah, 2013). Radikalisme disebabkan faktor: Pengetahuan agama yang tidak utuh, Tekstual, Gampang mengharamkan, Reaksi terhadap sekulerisme, Menggugat ketidakadilan (Hafid, 2020). Radikalisasi semakin gampang dengan adanya media populer (Fanani, 2013b). Radikalisasi berwujud seperti pada tindakan memaksakan kehendak kepada orang yang memiliki ideologi berbeda, dan hanya berpikir bahwa hanya kelompok mereka yang benar. Hal ini terjadi karena fanatik dan pemahaman keagamaan yang keliru (Rapik et al., 2020). Dalam konteks perilaku radikalisasi beragama di masa Pandemi COVID-19, pemaksaan kehendak nampak dari masyarakat Islam yang menuntut agar tetap bisa shalat tarawih, shalat Iedul Fitri, shalat berjamaah di masjid dan musholla.

Majelis Ulama Indonesia di tahun 1975 dan di Era Suharto memiliki corak moderat. Namun di era Reformasi corak Majelis Ulama Indonesia memiliki karakter konservatif dan radikal dengan mempromosikan syari'ahisasi dan implementasi syariah di ruang publik (Hasyim, 2020). Dalam kasus Pandemi COVID-19, fatwa Majelis Ulama Indonesia terdapat perbedaan, ada yang tidak memperlakukan ibadah di luar rumah, namun terdapat juga yang mengeluarkan fatwa untuk melarang beribadah di luar rumah seperti shalat tarawih.

Islam konservatif merupakan aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif yang cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku (Bruinessen, 2013). Islamisme merupakan ideologi dan gerakan yang berjuang untuk membentuk semacam "tatanan Islam" dalam bentuk Negara Islam, hukum syariat, atau pun hukum etis (Asef Bayat, 2013). Sikap intoleran dipicu oleh kebijakan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah (Luthfi Assyaukanie, 2018). Sikap radikal yang intoleran dijelaskan Syaukanie karena terdapat relevansi perangkat legal yang mendukung terjadinya konservatisme.

Fenomena Islam radikal di Asia Tenggara di Indonesia khususnya telah menjadi ancaman karena memunculkan aksi terorisme. Empat faktor kebangkitan radikalisme di Indonesia yaitu: represi rezim politik, persoalan sosial ekonomi, globalisasi, dan dukungan Arabia (Muzakki, 2014). Akar

radikalisme di Indonesia telah ada pada awal kemerdekaan Indonesia dan kemudian berkembang dengan adanya jaringan sponsor Islamisme transnasional. Saat ini di Indonesia Islam radikal dapat dilihat dari ormas berikut: Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Jama'ah Ikhwan al-Muslimin Indonesia (Muzakki, 2014). Kelompok Islam radikal ini memang tidak memiliki pendukung atau anggota yang banyak seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, namun aksi propaganda kelompok Islamis mulai menjadi arus utama ormas Islam, sebagai contoh, FPI awalnya hanyalah organisasi yang besar di Petamburan Jakarta, pasca Aksi Bela Islam 212 narasi Islamisme FPI mendapat dukungan luas masyarakat, dan anggota maupun simpatisannya semakin bertambah.

Radikalisasi beragama dapat dilihat pada masa Pandemi COVID-19. Ortodoksi beragama muncul dengan adanya perilaku dengan mengabaikan jaga jarak di waktu shalat berjamaah, memakai masker ketika shalat karena tidak terdapat dalam fiqh. Mengatasi persoalan fiqh di masa Pandemi COVID-19, Masdar F. Mas'udi menerbitkan buku "Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah". Namun resistensi kalangan radikal dan kelompok Islamis berupaya keras untuk menentang solusi fiqh yang ditawarkan kalangan moderat (Syamsurijal, 2020). Masa Pandemi COVID-19 umat Islam terbelah dua. Pertama, kelompok ekstrem yang lebih bersikap fatalis dengan menyerahkan semua yang terjadi di masa Pandemi COVID-19 kepada Allah dengan tanpa melakukan usaha mencegah dan mengatasinya. Bahkan bersikap cuek terhadap aturan protokol COVID-19 dan tetap memaksa beribadah layaknya masa normal. Kelompok ini lebih menggunakan perspektif teologi mesianis bahwa COVID-19 merupakan tanda akhir zaman. Kedua, kelompok moderat yang mentaati protokol COVID-19 dan menyikapinya secara pendekatan sains namun tetap bertawakal kepada Allah swt (Sabara, 2020).

Awal munculnya COVID-19, di bulan Januari-Februari 2020 di kalangan ulama Indonesia terdapat perbedaan pandangan bahkan persaingan pandangan keagamaan, sehingga muncul kontestasi fatwa COVID-19 antara otoritas ulama dan kalangan Islam baru atau otoritas agama baru yang dikenal dengan sebutan ustadz selebritis. Namun demikian, ketika COVID-19 semakin nampak, jelas, dan fakta hadir di setiap kota di Indonesia, kemudian fragmentasi dan kontestasi mulai berkurang dan mulai melakukan kolaborasi untuk mencegah dan mengatasi COVID-19 (Arrobi & Nadzifah, 2020).

Pandemi COVID-19 telah berdampak munculnya polarisasi kalangan umat Islam yang bercorak teologi Jabariyah, Qadariyyah, dan Islam Progresif.

Polar jabaristik di kalangan umat Islam merupakan kelompok yang menjadi penghambat pemerintah untuk menahan penyebaran COVID-19, karena kalangan fatalis ini secara total menyerahkan diri kepada Allah. Polar Qadariyyah, dinilai sebagai pandangan teologis yang dapat mendukung upaya pemerintah mengatasi COVID-19. Sedangkan polar teologi Islam Progresif secara intens mendorong pemerintah untuk lebih sigap, produktif serta membangun kerjasama lebih luas untuk menanggulangi bencana COVID-19 (Hidayah, 2020). Pemerintah membutuhkan peran ulama untuk mencegah COVID-19 semakin meluas, namun dimasa tersebut terjadi juga deotorisasi ulama secara individual dan institusional, hal ini terjadi karena: Pertama, persepsi masyarakat yang belum utuh memahami COVID-19 sebagai persoalan medis. Kedua, masyarakat Muslim belum lengkap memahami penjelasan ulama sebagai figur agama dalam menjelaskan arahan beribadah selama COVID-19. Ketiga, deotorisasi ulama yang cukup tinggi terjadi di masa pandemi COVID-19 (Pabbajah, Said, & Faisal, 2020).

Berdasarkan tinjauan penelitian relevan di atas yang terkait radikalisasi dan Pandemi COVID-19 dapat dilihat munculnya resistensi umat Islam terhadap cara-cara baru dalam beribadah, misalnya menjaga jarak ketika shalat. Secara teologis, berdasarkan penelitian di atas bahwa Pandemi COVID-19 dapat menampilkan kalam masyarakat Islam apakah mereka tergolong Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Terdapat juga pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa Pandemi COVID-19 merupakan tanda-tanda akhir zaman. Selain itu, Pandemi COVID-19 telah membuat degradasi otoritas ulama yang selama ini menjadi pedoman dalam ibadah. Perbedaan dan keunikan artikel "Perilaku Radikalisasi Beragama di Masa Pandemi COVID-19" bahwa Pandemi COVID-19 adalah sebuah kurikulum bagi kelompok Islamis untuk memelihara, melestarikan konservatisme dan ekstrimisme. Artikel ini mendiskusikan bahwa kelompok Islamis perlu sebuah materi, media dan momentum untuk ideologisasi radikalisme kepada masyarakat, sehingga tetap menjadi sebuah kekuatan besar dan akan dapat digerakkan dalam sebuah agenda kelompok Islamis.

Keunikan penelitian ini adalah metode netnografi, dimana peneliti mempelajari suasana batin masyarakat Jambi yang diungkapkan dalam

komentar-komentar di grup *Facebook* masyarakat Jambi terkait Pandemi COVID-19. Dengan mempelajari simbol, gambar, dan pola interaksi di *Facebook* tersebut, maka dapat dilihat bagaimana berita-berita Pandemi COVID-19 dibaca masyarakat Jambi, lalu kemudian menimbulkan reaksi dengan menulis pandangan-pandangan radikal seperti: Pandemi COVID-19 adalah rekayasa Cina yang anti Islam, dan menjadikannya sebagai media kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo yang dianggap tidak bersahabat dengan kelompok Islam.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu netnografi. Netnografi merupakan bentuk riset etnografi yang diadaptasi untuk riset di perangkat komputer (Kozinets, 2019). Netnografi diadaptasi dari etnografi untuk mempelajari masyarakat secara *online*. Netnografi merupakan metode yang lebih cepat, lebih mudah, dan tidak berbiaya tinggi jika dibanding dengan etnografi tradisional. Netnografi memberikan informasi simbol, makna, dan pola masyarakat digital (Kozinets, 2002). Objek penelitian netnografi ini adalah *platform* media sosial *Facebook* dalam grup-grup yang dikelola dan dikomentari oleh masyarakat Jambi serta komentar-komentar di media *online* lokal Jambi yang menampilkan peristiwa dan perilaku masyarakat Jambi selama awal-awal Pandemi COVID-19 sampai di Indonesia, Jambi khususnya.

Metode netnografi cocok digunakan untuk sebuah penelitian dengan topik yang sensitif dan sulitnya menemukan informan. Metode netnografi memberi ruang yang luas bagi peneliti untuk mempelajari opini, dan motif sebuah sikap dan tindakan (Langer & Beckman, 2005). Dalam menentukan objek yang diamati, seorang *netnografer* dapat mengamati sebuah komunitas *online* (Kozinets, 2002).

Netnografi merupakan sebuah modifikasi etnografi yang diterapkan untuk mengamati *daily activity*, *thick description* yang dilakukan sebuah entitas di dunia maya. Penelitian dengan menggunakan metode netnografi saat ini sudah lazim digunakan untuk mengamati fenomena masyarakat era digital. Sebuah penelitian netnografi dilakukan untuk memahami relasi sosial di alam maya atau media sosial. Kozinets menjelaskan bahwa penelitian netnografi merupakan bentuk khusus etnografi yang mengeksplorasi kebiasaan unik berbagai jenis interaksi sosial di internet. Melalui netnografi peneliti dapat mempelajari budaya masyarakat yang nampak secara *online*.

Tahap-tahap mengerjakan riset netnografi sebagai berikut: *pertama*, merumuskan pertanyaan penelitian dan identifikasi pendekatan *online*. *Kedua*, Pengumpulan data dilakukan secara langsung melakukan observasi komunitas dan anggotanya serta bagaimana terjadi serta memaknainya. *Ketiga*, analisis dan interpretasi melakukan klasifikasi, analisis koding dan kontekstualisasi tindakan komunikasi. *Empata*, etika penelitian dimana peneliti harus: a) memperkenalkan diri di sebuah komunitas yang secara intens diamatinya secara *daring*; b) menjamin anonim; c) memahami isu privat. *Lima*, *member check* dimana peneliti mempresentasikan hasil riset kepada orang yang diteliti untuk menyampaikan komentar mereka (Kozinets and Handelman, 1998). Dengan metode netnografi seperti yang dijelaskan di atas maka dalam proses penelitian dilakukan pengamatan media sosial, media *online* mengenai pemberitaan serta relasi dengan Pandemi COVID-19, yang memunculkan penguatan pandangan konservatif dan konsolidasi kekuatan kelompok Islamis. Peneliti mengamati media digital yang tergabung dalam grup *Facebook* dan komentar-komentar di media *online* Jambi.

Penelitian netnografi memiliki kelemahan ketidaksamaan antara alam maya dan realitas. Oleh karena itu peneliti melakukan verifikasi dan penambahan data dengan melakukan *indepth interview*. Terdapat 10 informan yang diwawancarai yang merupakan pengurus masjid, imam masjid, dan masyarakat umum yang ikut melakukan ibadah di luar rumah ketika ada himbuan untuk *social distancing*.

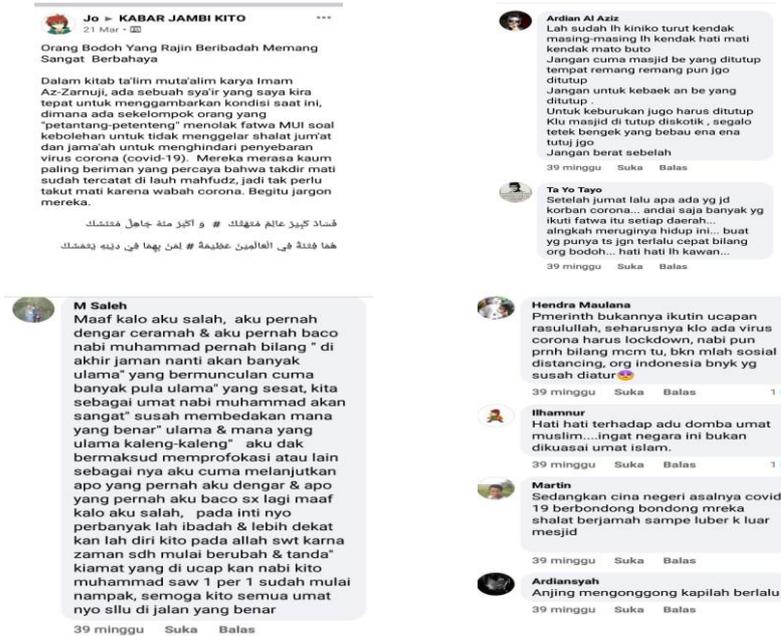
Analisis data dikerjakan secara interpretatif. Peneliti melakukan analisis data netnografi terlebih dahulu dengan melakukan *screenshot* untuk ditampilkan dalam temuan penelitian. Kemudian peneliti menambahkan data netnografi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti juga melakukan tahap *member check* sebagaimana dianjurkan Kozintes untuk memverifikasi temuan dan kesimpulan dari hasil penelitian kepada pihak yang diamati.

Teologi COVID-19

Grup Facebook Kabar Jambi Kito terjadi perdebatan pro dan kontra yang bersifat teologis dalam menyikapi Pandemi COVID-19. Terdapat postingan yang menyampaikan Kitab *Ta'lim Muta'alim* karya Imam Az-Zarnuji yang kemudian diserang dengan komentar kontra: Bahwa pemerintah hanya menutup masjid namun tidak bisa menutup diskotik; Tidak terdapat Muslim yang mengikuti shalat Jum'at terkena COVID-19; Pandemi COVID-19

merupakan pertanda akhir zaman; Cina sebagai sumber konflik sudah melakukan ibadah shalat.

Gambar 1. Perbincangan Teologis Pandemi COVID-19 dan



Terdapat perbedaan sikap antar desa dalam menyikapi himbauan dan fatwa mengenai COVID-19. Ada desa yang mematuhi himbauan pemerintah, namun juga terdapat desa yang tetap menyelenggarakan shalat tarawih. Imam Masjid Baiturrahman menyatakan bahwa mereka tetap menyelenggarakan shalat tarawih karena dijalankan dengan protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker. Sehingga tidak perlu lagi mengatur jarak *shaf* shalat, karena akan menjadi celah bagi setan untuk masuk. Sedangkan alasan tidak menggunakan *handsanitizer* karena air *wudhu* lebih suci (Andi, 2020). Masyarakat akan menggunakan protokol kesehatan jika terdapat sebuah kasus positif COVID-19 di sebuah desa. Namun jika tidak terdapat kasus positif, masyarakat cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan (Doni, 2020) Pandemi COVID-19 merupakan takdir Allah swt (Ucok, 2020). Pemerintah tidak bisa membatasi hak masyarakat Muslim untuk melakukan ibadah di luar rumah. Pandemi COVID-19 juga menghambat umat Islam dalam menjalankan ritual seperti bersalaman, *shaf* shalat yang jarang (Sukarnando, 2020). Jika COVID-19 benar-benar ada, maka wabah ini menjadi peringatan bagi manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah (Fadil, 2020). Umat Islam tidak perlu terlalu ketakutan mati karena COVID-19,

karena hidup dan mati ada di tangan Allah (Ilham, 2020). COVID-19 diciptakan oleh Allah maka Allah juga yang akan menghilangkannya. Wabah diturunkan Allah untuk menegur manusia yang sudah tidak mematuhi agama (Fivin, 2020).

Otoritas Ulama Jambi vs Ulama Youtube

Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Jambi, Kajari Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Kapolresta Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Kapolresta Jambi, Dandim 0415/Batanghari, Dandempom 2/11, Kepala kantor Kemenag Kota Jambi, Ketua MUI Kota Jambi dan Ketua Dewan Masjid Kota Jambi ini merujuk kepada Fatwa MUI dan Edaran Kementerian Agama. Di percakapan grup Kabar Jambi Kito, terdapat pernyataan bahwa fatwa MUI adalah sesat.

Gambar 2. Otoritas Ulama di Masa Pandemi COVID-19



Dibandingkan dengan data lapangan, masyarakat menyatakan nyawa dan takdir berada di tangan Allah bukan oleh virus, hingga membuat tetap banyak pengurus masjid menyelenggarakan tarawih berjamaah. Muncul sikap ekstrim tanpa pengetahuan dengan landasan ilmiah, “kenapa kami harus takut mati” (Nawi, 2020). Himbauan MUI agar pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah dan menutup sementara masjid untuk menghindari interaksi fisik ketika menjalankan ritual ibadah umat Islam yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Masjid bagaimanapun keadaannya harus diramaikan, dimakmurkan dan dipenuhi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam menyadari bahwa Pandemi COVID-19 adalah teguran dan peringatan kepada manusia agar tetap melaksanakan ibadah dan kehadiran COVID-19 tidak mesti menjadikan masjid sepi (Suhar, 2020).

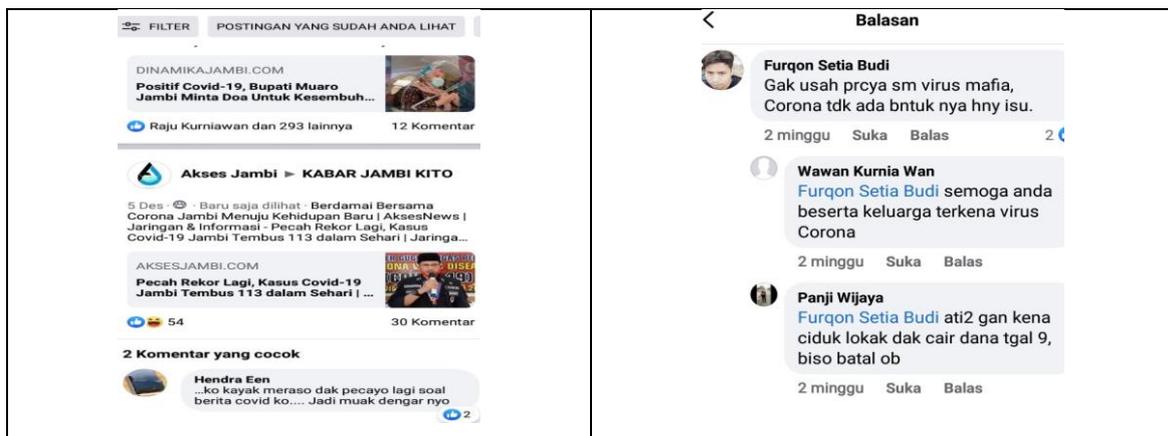
Terdapat masyarakat menyatakan MUI setan, karena telah melarang umat Islam beribadah di rumah ibadah selama masa awal Pandemi COVID-19 (Ilham, 2020).

Di Masjid Bougenvil, shalat tarawih dan Iedul Fitri tetap diselenggarakan dengan prinsip selama tidak dianggap mengganggu orang lain (Ustad Fivin, 2020). Di Masjid Al-Muhdar Jambi, shalat tarawih awalnya diselenggarakan berjamaah oleh masyarakat, namun kemudian ditegur oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan lurah, maka masyarakat diminta untuk tarawih di rumah masing-masing (Fadil, 2020). Masa Pandemi COVID-19, di Kota Jambi masih terdapat banyak masjid dan *musholla* yang menyelenggarakan tarawih, walau telah keluar himbauan dari Forum Komunikasi dan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta umat Islam di Ramadhan 1441 Hijriah ini untuk shalat tarawih di rumah. Sikap dan perilaku radikal melawan fatwa MUI dan himbauan organisasi masyarakat Islam, karena masyarakat yang lebih mempercayai ceramah-ceramah ustadz media sosial yang menolak pelarangan ibadah di luar rumah hanya karena Pandemi COVID-19.

Penyangkalan terhadap COVID-19

Di grup Facebook Kabar Jambi Kito banyak terdapat komentar yang melakukan penyangkalan keberadaan COVID-19. Netizen Jambi menyatakan bahwa COVID-19 hanya isu, dan ada juga yang menyatakan sudah bosan dengan pemberitaan COVID-19.

Gambar 3. Penyangkalan terhadap COVID-19



Dalam perbincangan jemaah di masjid, terungkap bahwa banyak kalangan Muslim yang menyatakan bahwa COVID-19 sebenarnya tidak ada (Ucok, 2020). COVID-19 adalah rekayasa pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan pengalihan isu-isu kegagalan pemerintahannya. Selain itu COVID-19 adalah rekayasa China untuk menghancurkan Islam (Isal, 2020). Selama Pandemi COVID-19 tidak terdapat kejelasan dan transparansi dari pemerintah terkait korban, dan pemakaman korban meninggal yang terkesan sengaja disembunyikan. Selain itu jumlah korban dari para aparat pemerintah tidak ada, sehingga memunculkan keraguan apakah COVID-19 benar-benar ada. Pandemi COVID-19 juga dicurigai masyarakat dimanfaatkan untuk bisnis oleh pemerintah dan pebisnis Cina. Jika benar COVID-19 ada, mengapa pada demonstrasi besar menolak *Omnibuslaw* tidak terdapat demonstran terpapar COVID-19. Pemerintah hanya melarang masyarakat beribadah di luar rumah namun membiarkan *mall* dan pasar tetap dibuka. Ditambah lagi dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah (Sukarnando, 2020).

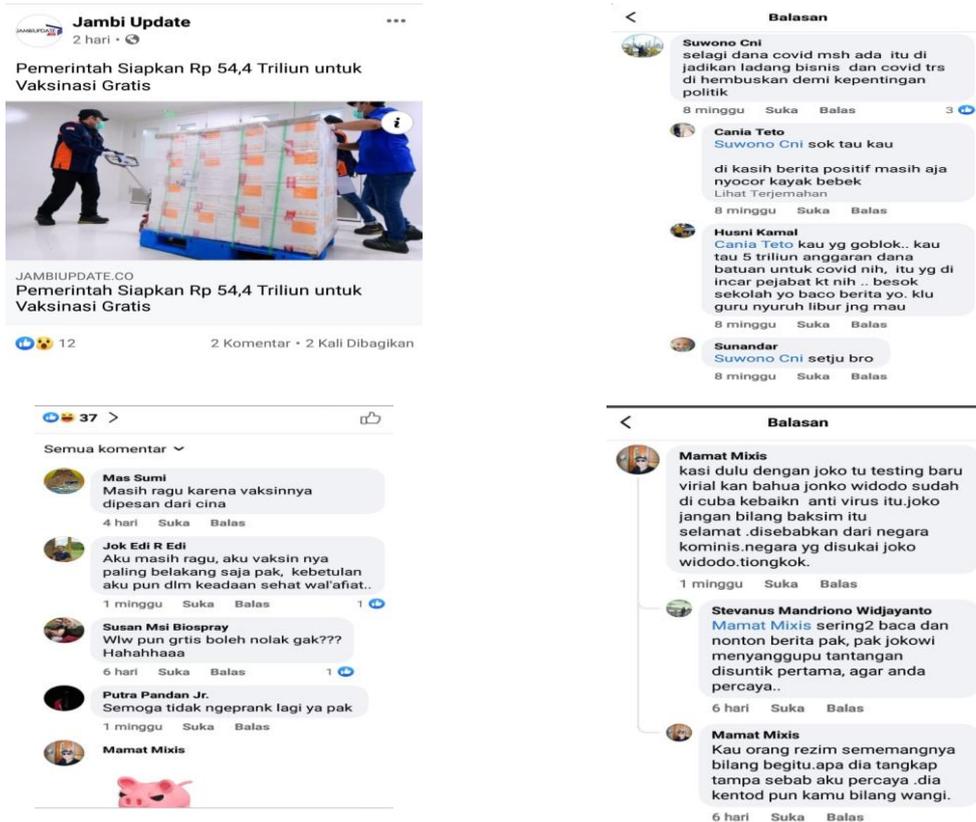
COVID-19 sebenarnya tidak ada, jika memang ada seharusnya pemerintah dapat bersikap tegas terhadap berbagai macam kerumunan, seperti yang dijalankan di Wuhan, China (Fadil, 2020). Imam Mushola Mujahidin mengatakan bahwa COVID-19 memang ada, namun tidak sedahsyat seperti dalam pemberitaan dan media sosial. Dapat dilihat saat ini orang yang positif COVID-19, namun kemudian mereka dapat sembuh. Berbeda dengan berita korban COVID-19 yang sangat dramatis (Basihin, 2020). Shalat tarawih dan Idul Fitri tetap diselenggarakan dengan cara tidak menggunakan pengeras suara (Nasarudin, 2020). Terdapat beragam bentuk ekspresi netizen Jambi yang menyangkal akan keberadaan COVID-19.

COVID 19: Ideologisasi Konservatisme dan Radikalisme

Kepatuhan masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta fatwa dari MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 hanyalah permainan isu politik pemerintahan Joko Widodo yang dianggap sebagai anti Islam, dibuktikan dengan adanya larangan beribadah di luar rumah. Di saluran media *online* Jambi Update nampak ekspresi masyarakat merespon vaksin COVID-19. Banyak terdapat komentar yang meragukan vaksin COVID-19. Walaupun pemerintah memberikan vaksin secara gratis, terdapat masyarakat yang menyatakan ingin menolak untuk di vaksin, salah satu alasannya adalah

vaksin dibuat dan dikirim dari China. Terdapat kritik keras masyarakat bahwa vaksin COVID-19 adalah permainan proyek pemerintah untuk menjadikannya sebagai ladang bisnis. *Netizen* radikal asal Jambi melakukan propaganda pemerintah Joko Widodo membeli vaksin China, karena kedekatan Joko Widodo dengan komunis China.

Gambar 4. Ekspresi Pandemi COVID-19



Isu, hoaks, dan propaganda yang dinarasikan di Facebook memiliki kecenderungan dikendalikan dan dinarasikan oleh kelompok-kelompok Islam konservatif seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Persaudaraan Alumni 212. Pandemi COVID-19 dijadikan semacam kurikulum untuk melestarikan spirit 212 dan Islam politik. Ustadz Adi Hidayat adalah salah satu ustadz yang didengar dan dirujuk pendapatnya oleh *netizen* dari masyarakat Jambi. Ustadz Adi Hidayat menyarankan masyarakat untuk shalat tarawih atau berjamaah di rumah saja, sedangkan jika badan merasa sehat maka shalat sebaiknya di masjid (Fadil, 2020). Ulama-ulama yang diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat lebih cenderung kepada ustadz-ustadz yang berafiliasi ke Aksi Bela Islam dan memiliki pengikut di *platform* media sosial

yang cukup digemari masyarakat Jambi. Pernyataan Ustadz Abdul Somad (UAS) bahwa virus Corona adalah tentara Allah awalnya cukup mempengaruhi kepatuhan masyarakat Jambi untuk menyatakan bahwa COVID-19 hanya akan menyerang non Muslim dalam hal ini pihak-pihak yang dianggap mereka anti Islam dan menyerang Islam, seperti penindasan Muslim Uighur di China.

Gambar 5. Ustadz Abdul Somad sebut Virus Corona adala Tentara Allah



Pernyataan UAS dapat dikatakan benar, karena merujuk tafsir Muhammad Abduh (Ilham, 2020). Imam Masjid Baitul Musholih mengatakan banyak jemaah di masjidnya yang menyepakati pernyataan UAS bahwa COVID-19 adalah tentara Allah yang diutus untuk menyerang musuh-musuh Islam (Ucok, 2020). UAS adalah ulama yang memiliki ilmu mendalam, banyak menguasai hadis, sehingga sangat tidak mungkin UAS membohongi umat dengan menggunakan dalil-dalil. Jika yang mengatakan adalah orang biasa, maka pernyataan COVID-19 sebagai tentara Allah patut dipertanyakan (Basihin, 2020). Seorang Tim Muda UAS Jambi mengatakan bahwa COVID-19 hanya permainan pemerintah, akal-akalan untuk menggunakan dana yang besar. Faktanya, banyak aktifitas seperti yasinan, dan acara pernikahan tidak berdampak pada peningkatan angka positif COVID-19. Sehingga pembatasan beribadah di luar rumah memunculkan pertanyaan di masyarakat (Ridwan, 2020). Para penceramah yang konten ceramahnya cenderung anti sains dan berafiliasi ke Persaudaraan Alumni 212 sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan radikalisasi perilaku beragama di masa Pandemi COVID-19.

Pergulatan Otoritas Keagamaan Ormas pada masa COVID-19

Radikalisme sangat berpeluang untuk membawa individu kepada tindakan radikal dan kekerasan (Bouzar, 2018). Paham radikal keagamaan merupakan satu langkah lagi menuju terorisme. Terbukti dengan aksi teror bom bunuh diri yang diawali dengan pembentukan pemahaman radikal terhadap agama (Fanani, 2013). Radikalisasi dimulai dari cara pandang terhadap agama, terutama yang berasal dari kitab suci yang terkait *jihad*, dan *amar makruf nahi munkar* (Rapik et al., 2020). Media digital dengan logika algoritma dapat menyatukan orang-orang yang memiliki satu kecenderungan dapat berkumpul setelah melakukan aktivitas *searching* di Google. Seringkali orang yang belum menjadi radikal akan berubah radikal setelah ia mengkonsumsi materi radikalisme dan terorisme setelah berselancar di internet (Rapik et al., 2020).

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada proses kognisi, emosi dan perubahan perilaku di masyarakat (Agung, 2020). Periode Maret, hoaks terkait COVID-19 sangat meluas dan mengubah perilaku masyarakat (Rahayu & Sensusiyati, 2020). Ketidapatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terjadi karena adanya bias informasi yang diterima (Habibi, 2020). *Netizen* masyarakat Jambi yang aktif dalam grup-grup Facebook serta komentar di kolom media *online* sangat mudah terpengaruh dengan propaganda yang bermuatan Islamisme. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi pendapat Azra bahwa agama akan selalu di atas namakan untuk aktivitas radikal (Azra, 2020). Di masa Pandemi COVID-19 kalangan Islamis menggunakan dalil-dalil agama dan ditambah dengan hoaks pseudo sains untuk meradikalisasi pandangan, sikap, dan perilaku beragama masyarakat yang disebarkan melalui media sosial, dan diramaikan dengan komentar-komentar yang menarasikan Islam menjadi sasaran dan tujuan direkayasanya COVID-19. Rahardjo (2020) menjelaskan banjirnya informasi COVID-19 telah menimbulkan *panic buying literature*, sebuah kondisi dimana masyarakat mengalami kebingungan harus mengikuti informasi yang mana dari yang telah beredar di media sosial dan media *online*.

Keberhasilan kalangan umat Islam yang menyebut diri alumni 212 dalam mengumpulkan jumlah besar massa untuk menggagalkan Ahok dan memuluskan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI telah menjadi euforia politik dan keagamaan sekaligus menjadi agenda yang mereka sebut sebagai agenda umat Islam (Azra, 2020). Namun demikian agenda politik kaum Islamis telah gagal, di masa Pemilu Presiden 2019 karena kurangnya daya tawar signifikan untuk menarasikan politik identitas di Indonesia (Azra,

2020). Kegagalan politik identitas kalangan Islamis tersebut membuat perlunya konsolidasi kekuatan dengan menggunakan berbagai momentum untuk melestarikan dan meradikalisasi paham keagamaan. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang dikapitalisir untuk memperkuat kaum Islamis yang memang telah menguat di Indonesia. Dalam kasus Pandemi COVID-19, di Jambi telah memunculkan konflik sosial secara terbuka di media sosial maupun secara riil, misalnya terdapat kontra masyarakat yang menolak shalat tarawih diselenggarakan oleh pengurus masjid. Pandemi COVID-19 jelas berdampak pada kehidupan harmonis masyarakat, karena terdapat perbedaan antara pandangan Muslim yang secara moderat menyikapi fatwa dan himbuan pemerintah dan masyarakat yang secara radikal menolak otoritas ulama seperti MUI, NU dan Muhammadiyah.

Penyebaran COVID-19 telah memunculkan konflik horizontal dan vertikal di masyarakat yang disebabkan dari berbagai akumulasi persoalan. Konflik di media sosial menampilkan ekspresi dan sikap yang mengkritik pemerintah mengenai pembatasan beribadah di luar rumah. Hal ini dilakukan karena aktivitas bisnis seperti *super market* yang dimiliki masyarakat Tionghoa tidak dibatasi oleh pemerintah. Persoalan Pandemi COVID-19 menjadi media kritik bagi kelompok Islamis yang memang telah menilai Pemerintahan Joko Widodo anti Islam dan sangat pro terhadap China. Kelompok masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo jika dipelajari di media sosial tidak terlepas dari pilihan politik di masa pemilihan umum Presiden Indonesia di tahun 2019 yang sangat kuat dengan isu-isu sektarian yang dipropaganda oleh kelompok Islamis yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah kelanjutan perjuangan ideologi Islamis. Kaitan antara Pandemi COVID-19 dengan politik juga terjadi di Amerika Serikat, Wu Jun (2020) menjelaskan Pandemi COVID-19 meningkatkan risiko kerusuhan politik dan sangat berpotensi bagi ketidakstabilan dalam kehidupan demokrasi Barat.

Pemerintahan di dunia sangat signifikan menggunakan tekanan politik yang memiliki konsekuensi membatasi kebebasan warga negara (Tisdell, 2020). Di Indonesia, pemimpin Aksi Bela Islam 212 dan Imam Besar Front Pembela Islam harus menjadi tersangka dan ditahan pihak kepolisian karena telah melanggar larangan kerumunan di masa Pandemi COVID-19. Di Jambi, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberikan respon dengan memasang *banner* aksi bela ulama, karena menganggap kasus hukum Habib Rizieq Shihab merupakan tindakan kriminalisasi ulama.

Social distancing merupakan cara paling efektif mencegah penyebaran COVID-19. Namun dalam praktiknya nilai dan ideologi sangat berpengaruh untuk mematuhi kebijakan pemerintah, di Amerika Serikat kalangan Republikan cenderung tidak mengikuti *social distancing*, sebaliknya kaum Demokrat (Painter & Qiu, 2020). Berbeda dengan di Indonesia, kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan ulama cenderung menjadi pilihan individu, daripada terikat nilai, ideologi dan organisasi masyarakat. Masa Pandemi COVID-19, masyarakat Muslim Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok ekstrim. Pertama, kelompok ekstrim yang sama sekali tidak mematuhi pemerintah dan fatwa ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Kedua, mematuhi pemerintah dan himbauan ulama. Kedua poros ini memunculkan banyak persoalan, misalnya terdapat konflik di masyarakat apakah harus mengadakan shalat berjamaah, tarawih di masjid. Masyarakat tidak mematuhi otoritas keagamaan dalam persoalan pencegahan penyebaran Pandemi COVID-19, serta mengapa MUI dan organisasi masyarakat Islam seperti kehilangan kewibawaan dan otoritas dalam mempengaruhi publik dalam mengatasi sebuah persoalan masyarakat, terutama kaitannya antara ajaran Islam dan wabah penyakit seperti COVID-19 dengan fatwa-fatwa dan himbauan keagamaan. Penelitian Nasution (2020) mengajukan dua konsep manajemen masjid di masa Pandemi COVID-19: Manajemen kebersihan, dan Manajemen fungsional masjid untuk memberikan informasi. Namun dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik dalam penelitian di masyarakat Muslim Jambi, misalnya menjelaskan relasi Islam dan ritual ibadah di masa Pandemi COVID-19.

Organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sebenarnya telah terlibat aktif membantu pemerintah dengan menyediakan rumah sakit, dan kegiatan-kegiatan filantropis (Hasyim, 2020). Masa Pandemi COVID-19 kalangan Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah berupaya menyadarkan publik dan pengikutnya mengenai bahaya COVID-19. Namun demikian terdapat ustadz yang dalam ceramahnya mengatakan bahwa COVID-19 adalah konspirasi, dan bahkan ustadz selebritis seperti Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa COVID-19 adalah tentara Allah yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan China yang dianggapnya telah menzalimi Muslim Uighur. Namun demikian, kemudian UAS merevisi pernyataannya dan ikut mendukung *social distancing* dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan MUI. Dalam perkembangannya di tengah COVID-19

masih mewabah, UAS telah mengisi pengajian yang dihadiri ribuan orang tanpa protokol COVID-19. Persoalan narasi COVID-19 sebagai rekayasa Cina juga juga berkembang di dunia internasional. Ilyas (2020) menjelaskan Pandemi COVID-19 telah membuat hubungan Amerika dan China memburuk, karena retorika Presiden Trump yang menyatakan “Chinese Virus” atau “Wuhan Virus” dan merupakan perang biologis yang ditujukan untuk Amerika. Pandemi COVID-19 juga telah menjadi isu populisme dengan munculnya berita-berita pengetatan perbatasan negara dan rasisme. Eberl (2020) menjelaskan publik tidak percaya dengan pemerintah dan menilai Pandemi COVID-19 disebabkan antara politisi dan lembaga ilmiah tidak transparan dan dialogis dengan masyarakat agar dapat memberi dan menerima informasi utuh dan terhindar dari hoaks dan kesalahan informasi. Sebuah buku berjudul “Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim menghadapinya” ditulis oleh Quraish Shihab untuk membalas argumentasi penceramah seperti UAS yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah tentara Allah.

Menurut Quraish Shihab (2020) COVID-19 adalah tentara setan yang harus dilawan. Quraish Shihab menjelaskan persoalan “takut kepada Allah” dan “takut terhadap virus”, sebagai berikut: (1) tidak selalu takut kepada Tuhan harus dipertentangkan dengan takut kepada makhluk; (2) bahwa Rasulullah mengajarkan menyelamatkan diri dalam keadaan perang dengan shalat *al-khawf* (QS. An-Nisa’ (4): 102), yang mencerminkan adanya dua ‘takut’ yaitu kepada Allah dan kepada musuh; (3) adanya konsep *dharurat* dalam Islam; (4) larangan untuk menjerumuskan diri dalam bahaya (QS. Al-Baqarah (2): 195); (5) dalam Islam perintah bertawakal selalu didahului dengan perintah berusaha, misalnya dalam QS. Al-Maidah (5): 23.

Pandemi COVID-19 yang memperkuat narasi Islamisme di sisi lain juga berdampak dengan pesatnya kajian keislaman *ala* pesantren yang dikembangkan oleh kalangan Islam moderat (Muhtada, 2020). Media *daring* seperti *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp* dibanjiri dengan kajian-kajian dari kalangan moderat yang selama ini terlihat vakum sehingga media *daring* dikuasai oleh kalangan fundamentalis. Dakwah kalangan moderat ini diperkuat di media sosial untuk memberikan pandangan keagamaan untuk mengimbangi apa yang didakwahkan kelompok Islamis yang cenderung memunculkan perilaku radikal masyarakat Muslim. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada kehidupan beragama masyarakat Islam: pelaksanaan ritual dan ibadah umat Islam, serta memudarnya otoritas keagamaan, persoalan pemahaman keagamaan memunculkan permasalahan

tersendiri dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dapat dikatakan otoritas keagamaan telah gagal menjalankan fungsinya. Perguruan tinggi Islam seperti UIN dan IAIN dalam masa Pandemi COVID-19 juga dapat dianggap gagal, karena tidak berhasil memberi informasi bagaimana masyarakat Islam dapat menyelaraskan antara ajaran Islam dan dengan persoalan sains terutama dalam keilmuan medis.

Peristiwa kebangkitan kelompok Islamis pada dasarnya memiliki motif kepentingan kelompok dan keuntungan ekonomi justru terbukti dapat melahirkan kekuatan politik Islam di tengah-tengah masyarakat, bukan murni ideologi atau ajaran agama itu sendiri (Garadian, 2019). Penguatan ideologi kelompok Islam konservatif ini jelas membantah pengusung teori pos-Islamisme yang mengatakan bahwa saat ini dinamika Islam Indonesia, gerakan radikalisme dan kekerasan atas nama agama telah dapat dialihkan.

Arus konservatisme telah memberi warna lain bagi organisasi masyarakat Islam yang telah mapan, seperti kasus MUI dan Muhammadiyah (Wahid, 2020). Dengan adanya radikalisme perilaku beragama yang semakin gencar, semestinya menjadi refleksi kelompok Islam Wasathiyah untuk tidak terus berada di zona nyaman, karena kelompok Islamis sedang mengarus utama yang bisa saja akan mengganti posisi ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dengan ekspresi *netizen* Jambi yang lebih menyepakati narasi-narasi keagamaan kalangan Islamis dalam menyikapi Pandemi COVID-19. Era Pemerintahan Joko Widodo dianggap anti pluralisme, termasuk terhadap kelompok Islamis (Fealy, 2020). Pernyataan Fealy ini menegaskan bahwa radikalisme pada Pandemi COVID-19 sebagai perlawanan kelompok Islamis terhadap Pemerintah yang dinilai represif terhadap kelompok Islam. Fealy menilai bahwa partai pendukung Joko Widodo, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melihat Islamisme sebagai ancaman bagi persatuan, netralitas agama dan inklusifisme.

Para Islamis bagi PDI-P sebagai pengusung Joko Widodo merupakan organ perusak bangsa yang hanya mempersoalkan kepentingan umat Islam dalam konsep Negara nasionalis. Fealy menolak pandangan, bahwa kaum Islamis harus dihabiskan masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Bagi Fealy saat ini konservatisme merupakan hal wajar, dan memang sedang berkembang di Asia Tenggara. Namun teori Fealy bahwa pemerintah bertindak represif terhadap konservatisme merupakan hal wajar jika tidak dapat diterima Joko Widodo yang sudah cukup akomodatif terhadap kelompok

konservatif. Dapat dilihat masih banyak *ustadz* berpaham radikal masih dapat menghujat pemerintah di ceramah-ceramah *Youtube*. Tindakan represif yang dikatakan Fealy pada dasarnya adalah tindakan konstitusional dalam mempertahankan ideologi dan persatuan Negara.

Simpulan

Pandemi COVID-19 telah menjadi momentum bagi kelompok Islamis melakukan konsolidasi ideologi dan gerakan kritik terhadap pemerintah. Pada kasus Pandemi COVID-19, masyarakat cenderung tidak mematuhi otoritas ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Bagi masyarakat yang mendapat informasi melalui media sosial seperti *Facebook*, Media online, dan *Youtube* telah menjadi rujukan dalam berperilaku semasa Pandemi COVID-19. Masyarakat lebih mengikuti *ustadz* di media digital daripada otoritas agama yang ada seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI. Pandemi COVID-19 menjadi sarana ideologisasi “tauhid” yang mempropagandakan masyarakat untuk tidak takut kepada COVID-19, karena hanya Allah yang dapat menentukan hidup dan mati manusia. Proses penguatan tauhid yang anti sains ini telah menjadi pondasi penguatan ideologi untuk menjadi konservatif dan Islamis. Propaganda dan internalisasi kelompok Islamis kepada masyarakat awam melalui *platform* media sosial *Facebook* telah menjadikan *netizen* Jambi ke dalam bentuk *soft radicalism*, yaitu sebuah benih dan bekal untuk menjadi seorang Muslim radikal, dengan pandangan dan perilaku keagamaan yang diradikalisasi dengan sebuah tema seperti Pandemi COVID-19. Masyarakat *soft radical* ini merupakan sebuah modal sosial bagi kalangan radikal untuk dapat digerakkan dalam sebuah momentum politik ataupun untuk sebuah agenda ideologis jangka panjang.

Referensi

- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*.
- Akh Muzakki. (2014). The Roots, Strategies, and Popular Perception of Islamic Radicalism in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 08(1).
- Andi. (2020). *Wawancara*. Muara Jambi.
- Arrobi, M. Z., & Nadzifah, A. (2020). Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi? *Maarif*, 15(1), 197–215.

- Asef Bayat. (2013). Post-Islamisme at Large. In Asef Bayat (Ed.), *Post-Islamism: the Changing Faces of Political Islam*. New York: Oxford University Press.
- Asrori, A. (2017). RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas dan Antropisitas. *KALAM*. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Azyumardi Azra. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*. Jakarta: Kompas.
- Basihin. (2020). *Wawancara Imam Mushola Mujahidin Muara Jambi*.
- Bruinessen, M. van. (2013). *Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining the "Conservative Turn."* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Burhanuddin Muhtadi. (2018). No Title. *MAARIF, Politik Id*, 85.
- Convey Indonesia. (2020). *Radikalisme dan Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan*. Jakarta.
- D. Bouzar. (2018). Stages of the radicalization and deradicalization process. Practicies Project. In *Reserach and Innovation Action (RIA)*. USA.
- Dani Muhtada. (2020). *COVID-19, Moderasi Beragama, dan Kontra-Radikalisme*. Jakarta.
- Darraz Abdullah, M. (2013). Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan. *MAARIF (Arus Pemikiran Islam dan Sosial)*.
- Din Wahid. (2020). Kembalinya Konservativisme Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 21(2).
- Dirga Maulana. (2017). The Exclusivism of Religion Teachers: Intolerance a and Radicalisme in Indonesia Public Schools. *Studia Islamkia*, 24(2).
- Doni. (2020). *Wawancara, Muara Jambi 8 Agustus 2020*.
- Eberl, J.-M., Huber, R. A., & Greussing, E. (2020). *From Populism to the 'Plandemic': Why populists believe in COVID-19 conspiracies*.
- Endi Aulia Garadian. (2019). Para Wali Nyentrik: Rekontekstualisasi Islamisasi di Tanah Jawa, Menantang Fundamentalisme Islam. *Studia Islamika*, 26(2).
- Fadil. (2020). *Takmir Mesjid al-Muhdar Kota Baru Jambi*.
- Fanani, A. F. (2013a). Fenomena Radikalisasi di Kalangan Muda. *MAARIF*, 5.
- Fanani, A. F. (2013b). Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda. *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, 8(1), 4-13.
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19. *Journal.Uinjkt.Ac.Id*.
- Hafid, W. (2020). Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.37>
- Hasyim, S. (2020). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian

- Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 21–35.
<https://doi.org/10.1017/trn.2019.13>
- Hidayah, N. (2020). *Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga islam progresif: respons muslim atas pandemi COVID-19 di Indonesia*.
- Ilham. (2020). *Wawancara Penyuluh Agama Kota Jambi*.
- Ilyas, A. (2020). *Covid-19 Pandemic: Emergence of A New Geopolitical Perspective*.
- Isal. (2020). *Jemaah Mesjid Darussalam Kota Jambi*.
- Kompas. (2020, September). No Title. *kompas*.
- Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities. *Journal of Marketing Research*.
<https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935>
- Kozinets, R. V. (2019). *Netnography Netnography : Understanding Networked Communication Society By York University , Toronto , Canada Chapter for The SAGE Handbook of Social Media Research Methods Edited by Anabel Quan-Haase and Luke Sloan First Draft Only*. (February 2015).
- Langer, R., & Beckman, S. C. (2005). Sensitive research topics: Netnography revisited. *Qualitative Market Research*, 8(2), 189–203.
<https://doi.org/10.1108/13522750510592454>
- Luthfi Assyaukanie. (2018). Akar-akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia. *MAARIF*, 13(2).
- Maliki, M. (2020). Covid-19, Agama, dan Sains. *MAARIF*, 15(1).
- Nasarudin. (2020). *Wawancara Mesjid Baitul Ikhlas Jambi*.
- Nasution, N. H. . W. (2020). MANAJEMEN MASJID PADA MASA PANDEMI COVID 19 Oleh: Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M.Ag 1 Dr. Wijaya, M.Si. 2. *Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19*, 2(1), 1.
- Nawi. (2020). *Wawancara Imam Mesjid Darussalam, 30 Agustus 2020*.
- Pabbajah, M., Said, N. M., & Faisal, M. (2020). Deauthorization of the Religious Leader Role in Countering Covid-19: Perceptions and Responses of Muslim Societies on the Ulama's Policies in Indonesia. *International Journal*, 9(1), 263–273.
- Painter, M., & Qiu, T. (2020). Political beliefs affect compliance with covid-19 social distancing orders. *Available at SSRN 3569098*.
- Pradana Boy ZTF. (2017). Diskursus Islam Indonesia: Moderat, Progresif, dan Radikal. In Muhammad Abdullah Darraz (Ed.), *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme (I)*. Bandung: Mizan.
- R. V. Kozinets and J. Handelman. (1998). Ensouling consumption: a netnographic exploration of the meaning of boycotting behavior. *Advances in Consumer Research*, 25.
- Rahardjo, W., Qomariyah, N., Mulyani, I., & Andriani, I. (2020). Social Media Fatigue pada Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19 : Peran Neurotisme, Kelebihan

- Informasi, Invasi Of Live, Kecemasan, dan Jenis Kelamin. *Psikologi Sosial*.
- Rahayu, R. N., & Sensusiyati. (2020). Analisis Berita Hoax Covid - 19 Di Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*.
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11>
- Ridwan. (2020). *Wawancara Tim Muda UAS Jambi*.
- Sabara, S. (2020). BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19. *MIMIKRI*, 6(2), 131–149.
- Sebastian, L. C., Hasyim, S., & Arifianto, A. R. (2020). Rising islamic conservatism in indonesia: Islamic groups and identity politics. In *Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics*. <https://doi.org/10.4324/9781003010920>
- Shihab Quraish. (2020). *Corona Ujian Tuhan Sikap Muslim Menghadapinya* (hal. h. 4.). hal. h. 4.
- Suhar. (2020). *Wawancara Imam Musholla Al-Ikhlas*.
- Sukarnando. (2020). *Takmir Mesjin Al-Amin*.
- Supian Ramli dkk. (2020). *Trilogi Teologi Masyarakat Jambi di Masa Pandemi Covid-19*.
- Syafiq HasyimHasyim, S. (2020). *Covid-19, Islamic Civil Society and State Capacity in Indonesia*. Singapore.
- Syamsurijal, S. (2020). Religiositas yang Naif: Ortodoksi Masyarakat Muslim di Tengah Bayang-bayang Pandemi Covid-19. *MIMIKRI*, 6(2), 150–170.
- Tisdell, C. A. (2020). Economic, social and political issues raised by the COVID-19 pandemic. *Economic analysis and policy*, 68, 17–28.
- Ucok. (2020). *Wawancara Imam Mesjid Baitul Musholih Jambi, 10 Agustus 2020*.
- Ustad Fivin. (2020). *Wawancara Pengurus Mesjif Bogenvil Jambi*.
- Wahyudi Akmaliah. (2020). *When Islamism and Pop Culture Meet: a Political Framing*.
- Wu, J. (2020). Tackle the free radicals damage in COVID-19. *Nitric oxide*.